



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung

Telp. (0721) 704626 Fax. (0721) 704626

Transkrip Wawancara

Sikap Politik Anggota DPRD Terhadap Anggota DPRD Perempuan

di Lembaga Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung

A. Identitas Informan

1. Nama : Ir. Ratna Hapsari Barusman, MM, MH
2. Umur : 42 Tahun
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Fraksi : Kebangkitan Nurani Rakyat Indonesia
6. Jabatan : Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota
Bandar Lampung
7. Pendidikan Terakhir : Magister Hukum

Hasil Wawancara

Pewawancara : Apa pendapat Ibu tentang keterwakilan 30% perempuan di
Lembaga Legislatif?

Informan : Dalam DPRD Kota Bandar Lampung dari Jumlah 45 Anggota
DPRD Kota Bandar Lampung, terdapat 6 Anggota Perempuan

yang berarti hanya mencapai 13% yang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Jadi memang belum memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Pewawancara : Menurut Ibu adakah syarat khusus yang harus dimiliki Caleg perempuan yang berasal dari partainya agar kuota 30% di Legislatif terpenuhi?

Informan : Antara laki-laki dan perempuan sama saja, artinya bagaimana mempengaruhi masyarakat untuk percaya dan mewakili masyarakat melalui aspirasinya, tergantung dari individunya. Jadi tidak ada hal-hal khusus perempuan, karena prinsipnya sama akan tetapi mungkin jika perempuan pendekatannya berbeda yang berkaitan dengan segi keperempuanannya. Dan kembali ke anime masyarakat itu sendiri, dan dengan adanya ketentuan 30% ini memaksa partai untuk merekrut perempuan yang berminat dibidang politik untuk mencapai 30%.

Pewawancara : Menurut Ibu dengan adanya keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif dapat meningkatkan kualitas kinerja anggota DPRD dan dapat memperjuangkan tentang kepentingan perempuan?

Informan : Dengan suara perempuan lebih banyak, akan otomatis lebih baik. Akan tetapi lebih efektif atau tidak tergantung dari kualitasnya dari masing-masing perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif, jika mereka ramai tapi tidak bersuara dan tidak punya kapabilitas yang sesuai untuk mendukung sesama kepentingan perempuan

walaupun sedikit tapi berkemampuan akan terlihat besar berdasarkan kualitas individunya. Akan tetapi harapanya lebih banyak lebih baik, karena lebih banyak pilihan dan dukungan karena ada hal-hal tertentu yang hanya dapat dimengerti oleh perempuan yang apabila banyak terwakili akan semakin bagus. Walaupun memang dari standar yang ditentukan masih jauh bahkan belum sampai separuhnya.

Pewawancara : Didalam proses pemilu yang menempatkan perempuan sebagai anggota legislatif tidak mencapai kuota 30%, permasalahan tersebut dikaitkan dengan isu primordialisme serta kultur budaya oleh masyarakat. Sebagai anggota DPRD bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut?

Informan : Apabila dilihat dan dihitung tentang kultur budaya itu sendiri saya tidak setuju karena kembali kepada kualitas caleg tersebut dan pemilihan itu banyak konstituen atau banyaknya calon yang laki-laki bukan berarti masyarakat lebih percaya terhadap laki-laki, karena yang mencalonkan diri lebih banyak laki-laki bukan karena perempuan yang memilih laki-laki, akan tetapi apabila banyak perempuan yang bisa dipilih mungkin akan lain lagi. Walaupun perempuan memiliki keterbatasan yang memiliki posisi sebagai ibu rumah tangga, ataupun yang lainnya dan mungkin memang tidak sebebaskan laki-laki.

Pewawancara : Apa yang telah dilakukan oleh anggota DPRD agar keterwakilan 30% perempuan dapat tercapai di Lembaga Legislatif ?

Informan : Mengadakan Sosialisai mengenai Keterwakilan perempuan bisa melewati kampanye, walaupun anggota DPRD hanya turunan dari pusat yang dapat mengawasi dan menjalankan tapi anggota DPRD berkemungkinan untuk mengusulkan melalui perwakilan partainya yang berada di pusat. Mengenai Undang-undang yang dapat lebih mendukung keterwakilan 30% perempuan.

Pewawancara : Apa yang telah dilakukan oleh partai Ibu agar keterwakilan 30% perempuan dapat tercapai di Lembaga Legislatif?

Informan : Sosialisasi, perekrutan dan penjaringan. Setiap partai mempunyai jaringan mulai dari DPC, ranting sampai anak ranting itu bagian dari jaringan, dari jaringan itu di sosialisasikan mengenai pencalonan perempuan, dari pendaftaran diseleksi kemudian dikomposisikan. Dan harus memenuhi verifikasi 30% keterwakilan perempuan jika tidak, tidak akan lolos. Kemudian didalam no urut pemilu caleg, secara umum no urut partai tidak berpengaruh pada pemilihan karena suara terbanyak. Ada kepengurusan tim caleg, dan keputusannya berdasarkan rapat pleno di DPC dan DPD nya masing-masing untuk menentukan nomor urut. Mengikuti kepengurusan partai, kontribusi kepartai, sisi baik dia, dan sebagainya, ada penilaian masing-masing pada partainya, kemudian elektabilitas orang itu terhadap partainya seperti dia memiliki negosiasi yang baik, punya massa yang menjadi power sendiri bagi partainya.

Pewawancara : Menurut Ibu pihak-pihak mana saja yang harus mengupayakan tercapainya keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif?

Informan : Masyarakat, khususnya Perempuan itu sendiri yang ingin suaranya untuk diperjuangkan oleh kaum perempuan itu sendiri. Kemudian LSM perempuan yang merupakan salah satu upaya merekrut kelompok-kelompok yang memperjuangkan perempuan. Serta peran Anggota DPRD perempuan yang dapat mempromosikan bahwa duduk sebagai anggota DPRD perempuan dapat memperjuangkan yang berkaitan dengan perempuan seperti meningkatkan anggaran untuk ibu-ibu menyusui yang membutuhkan vitamin dan susu yang berada di posyandu-posyandu.

Pewawancara : Apakah Ibu setuju dengan adanya Keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif?

Informan : Setuju Sekali, Jika bisa dibalik jadi 70% perempuan dan 30% laki-laki. Jadi tidak terlalu keras persaingannya, dan jika terlalu banyak laki-laki suasana jadi penuh.